

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021**





KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Adapun isi pokok dari **Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021** ini merupakan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan baik dari segi isi materi dan teknis dalam penjabaran setiap kegiatan. Untuk itu kami sangat berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) berikutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat memberikan arah terhadap pola penentuan anggaran untuk program kegiatan tahun anggaran 2021 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika dari pemerintah Kabupaten Subang yang esensinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2021, tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 semoga dapat bermanfaat sebagai bahan motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta menjadikan masukan sekaligus umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Subang, Oktober 2021

Δ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang



Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630312 199412 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan:.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021 dan Capaian Renstra Diskominfo.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISKOMINFO	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.....	21
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	43
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.2. PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	47
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan	50
BAB IV PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.....	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel 2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	30
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan	49
Tabel 3.2 Matriks Pergeseran Anggaran untuk Perubahan Anggaran Tahun 2021	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Subang wajib menyusun RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Renja OPD adalah acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam Pembangunan Daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat, tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Renstra Strategis OPD.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari Penyusunan Rencana Kerja OPD, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting OPD, menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD OPD yang bersangkutan.

Di samping itu pula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, dituntut untuk membuat Rencana Kerja Tahunan sebagai pertanggungjawaban Rencana Strategis Dinas, sehingga bisa diaplikasikan.



Proses Penataan Program Kegiatan sebagai media operasional pertanggungjawaban OPD dalam lembaga pemerintahan di Kabupaten Subang, Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan Rancangan yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Awal untuk periode anggaran tahun 2021 sebagai Pengajuan Program Kegiatan Pembangunan, tidak terlepas dari kedudukan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang tercantum pada Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Penjabaran dimaksud dijadikan sebagai dasar pijakan untuk merancang Program Kegiatan Pembangunan di sektor Komunikasi dan Informatika tahun 2021 yang disusun pada periode kepemimpinan Bupati Subang tahun 2018-2023, dengan menekankan pada upaya peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika yang memperhatikan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2020.

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menumbuh kembangkan pengertian dan kesadaran masyarakat serta memelihara kontinuitas partisipasi dalam usaha pembangunan serta terserapnya aspirasi, harapan dan opini masyarakat oleh pemerintah melalui proses penyampaian informasi dan komunikasi 2 arah melalui berbagai media/sarana komunikasi dan informatika yang ada.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2021 merupakan Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode Tahun 2019-2023 yang di dalamnya memuat program dan kegiatan pokok serta sasarannya. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan-kegiatan pokok pada Renstra. Sedangkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Pemerintah Kabupaten Subang dan mengacu pada Indikator RPJMD untuk tahun 2021.

Kegiatan-kegiatan pokok akan menjadi sasaran yang hendak dicapai merupakan payung bagi penjabaran dalam kegiatan-kegiatan yang lebih terinci dan terurai dalam Renja tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang APBD merupakan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (RKPD);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang



Komunikasi dan Informatika;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan kerja Pemerintah Daerah tahun 2022
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), DAN Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona virus DISEASE 19 (COVID-19)*;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona virus disease 2020* tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Tahun Anggaran 2020;
23. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;

28. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
29. Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
30. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
31. Surat Edaran Bupati Subang Nomor PR.04/540/BP4D Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang pada Tahun 2021 sebagai upaya dalam pencapaian **Visi** dan **Misi** Kabupaten Subang. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan SKPD, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya alam pembanguna daerah. Renja OPD tahun 2021 dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2021 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Daerah.



1.4. Sistematika Penyusunan:

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2021 disusun berdasarkan Sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV: PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021 dan Capaian Renstra Diskominfo

- A. Sebelum membahas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, disampaikan terlebih dahulu bahwa pada Tahun 2020 Diskominfo Kabupaten Subang memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp 12.844.887.429,66 (Dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma enam puluh enam rupiah). Pagu Anggaran tersebut bersumber dari APBD murni sebesar Rp 8.294.887.429,66 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma enam puluh enam rupiah) dan bersumber dari APBN berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- B. Namun dalam perjalanannya, terjadi *refocussing* belanja APBD Kabupaten Subang sebagai tindaklanjut dari Permenkeu RI No 35/PMK.07/2020, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ – Nomor 177 /KMK. 07/ 2020. Kedua peraturan tersebut secara substansi terkait dengan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* 19). Selain kedua peraturan tersebut, *refocussing* didasarkan pula kepada Surat Sekretaris Daerah No. ku. 03.905- perihal penyesuaian Skala Prioritas SKPD pada DPA-SKPD Tahun 2020.
- C. Merujuk peraturan sebagaimana di atas, berdampak kepada besaran pagu anggaran Diskominfo pada 2021 yang semula Rp 14.277.26.685 menjadi Rp 13.685.155.304 dengan adanya *refocusing* anggaran sebesar Rp 220.513.000, maka evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo TA 2021 didasarkan pada pagu hasil *refocusing* anggaran menjadi Rp 13.655.155.304. Dituangkan dalam uraian tabel berikut dibawah ini:



D. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13,655,155,304	8,332,859,917	5,322,295,387	61.02
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13,238,392,054	6,475,412,047	6,762,980,007	48.91
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,305,581,753	5,518,025,111	2,787,556,642	66.44
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143,712,500	76,513,000	67,199,500	53.24
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,537,500	522,500	3,015,000	14.77
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23,700,000	14,700,000	9,000,000	50.63
2	16	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,405,000	-	3,405,000	-
2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,925,000	380,000	1,545,000	19.74
2	16	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,990,000	-	2,990,000	-

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021



2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,985,000	24,625,500	17,359,500	58,65
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,170,000	36,285,000	29,885,000	54,84
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,208,646,914	4,558,401,237	1,650,337,176	73.42
2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,198,746,914	4,553,451,237	1,645,387,176	73
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,950,000	-	4,950,000	-
2	16	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,950,000	4,950,000	-	100
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,500,000	-	27,500,000	-
2	16	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27,500,000	-	27,500,000	-
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	617,413,040	267,798,964	469,942,141	30.01
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,011,300	8,986,300	2,025,000	21.34
2	16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160,281,240	64,130,512	96,150,728	39.42
2	16	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,957,500	15,106,100	5,851,400	36.11
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,800,000	68,923,518	29,876,482	69.76
2	16	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,925,000	-	23,925,000	-
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302,653,000	110,652,534	192,000,466	36.56
2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	517,797,950	167,208,000	350,589,950	32.29
2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	517,797,950	167,208,000	350,589,950	32.29

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021



2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	561,137,850	323,661,779	237,476,071	57.68
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361,877,850	190,941,779	170,936,071	52.76
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199,260,000	132,720,000	66,540,000	66.61
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	229,067,000	124,442,131	104,624,869	54.33
2	16	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62,420,000	27,834,500	34,585,500	45
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,120,000	19,581,131	15,538,869	56
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116,530,000	62,390,000	54,140,000	53.54
2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,997,000	14,636,500	360,500	97.60



2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,150,735,550	491,315,200	659,420,350	42.70
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,150,735,550	626,318,600	659,420,350	42.70
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	608,713,500	286,672,600	385,214,300	36.72
2	16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	61,892,500	27,000,000	34,892,500	43.62
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	480,129,550	308,146,000	239,313,550	50.16
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3782,074,751	1,883,811,206	1,898,263,545	33.76
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,624,619,000	1,426,676,206	1,197,942,794	54.36
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2	16	03	2	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2,624,619,000	1,426,676,206	1,197,942,794	54.36
2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,157,455,751	457,135,000	700,320,751	39.49
2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	569,145,750	373,950,000	195,195,750	65.70
2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	588,310,001	83,185,000	505,125,001	14.14
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	81,870,000	36,000,000	45,870,000	43.97
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	81,870,000	36,000,000	45,870,000	43.97
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81,870,000	36,000,000	45,870,000	43.97
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	70,275,000	31,500,000	38,775,000	44.82

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021



2	20	02	2	01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	7,095,000	-	7,095,000	-
2	20	02	2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	4,500,000	4,500,000	-	100
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	334,893,250	268,705,000	66,188,250	80.24
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	334,893,250	268,705,000	66,188,250	80.24
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	334,893,250	268,705,000	66,188,250	80.24
2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	334,893,250	268,705,000	66,188,250	80.24



Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Nama OPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab.Subang

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Catatan
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	12	13		14
19		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik										
19	02	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Opini dan Aspirasi	3 media, 360 opini	100	3 Media	3 Media	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
19	06	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah Konten dan Siaran	3 paket	100	1.412 Konten, 9490 Siaran	1.412 Konten, 9490 Siaran	100	-	-	-	Sesuai target Renstra



19	07	Penyediaan Informasi dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
19	010	Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media	Jumlah Kegiatan	500 eks. majalah	500 eks. majalah	100	1 kali sandiwara, 3 kali wayang, cetak tabloid (12 kali dlm satu tahun)	1 kali sandiwara, 3 kali wayang, cetak tabloid (12 kali dlm satu tahun)	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
19	015	Koordinasi Pelaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan BinteK/Sosialisasi	1 kegiatan BinteK/Sosialisasi	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
2.16.02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
2.16.02.2.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	6 Jenis	3 Jenis	50	Sesuai target Renstra
2.16.02.2.01.06		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	80 Orang	80 Orang	86.40	Sesuai target



			Sosialisasi PPID										Renstra
2.16.02.2.01.12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Jenis Kegiatan	-	-	-	-	-	-	3 Jenis	2 Jenis	66.67	Sesuai target Renstra
20		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika											
20	01	Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan	25 sub domain	25 sub domain	100	1 jenis kegiatan (Pelatihan Call Center)	1 jenis kegiatan (Pelatihan Call Center)	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
20	03	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Umum yang terintegrasi	10 aplikasi umum/khusus	10 aplikasi umum/khusus	100	10 aplikasi umum/khusus	10 aplikasi umum/khusus	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
20	010	Layanan Akses Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Layanan	11 titik publik, 1 titik LPSE & 1 titik Diskom	11 titik publik, 1 titik LPSE & 1 titik Diskominfo	100	75 Titik	75 Titik	100	-	-	-	Sesuai target Renstra



				info									
20	0 1 1	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan	1 kegiatan Sosialisasi dgn 50 org peserta	1 kegiatan Sosialisasi dgn 50 org peserta	100	2 jenis (Bintek & Jasa Konsultasi)	2 jenis (Bintek & Jasa Konsultasi)	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
20	0 1 2	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Jenis Infrastruktur Data Center Disaster Recovery Center dan TIK	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 jenis	1 jenis	100	-	-	-	Sesuai target Renstra
2.16.03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA											
2.16.03.2.01.02		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah Jenis Kegiatan	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Sesuai target Renstra



		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
2.16.03.2.01.02		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah layanan wifi/akses internet Broadband	-	-	-	-	-	-	90 Titik	119 Titik	100	Sesuai target Renstra
2.16.03.2.02.07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	-	-	-	-	-	-	10 Aplikasi	10 Aplikasi	100	Sesuai target Renstra
2.16.03.2.02.07		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1 Jenis	2 Jenis	33	Sesuai target Renstra
21		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah											
21	01	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Buku Perbup	-	-	-	4 Buku	4 Buku	-	-	-	-	Sesuai target Renstra
21	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang	Jumlah Peserta Bimtek	-	-	-	5 ASN	5 ASN	-	-	-	-	Sesuai target Renstra



		Keamanan Informasi											
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
2.21.02.2. 01.03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berkas Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	4 jenis	3 jenis	75	Sesuai target Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISKOMINFO

Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagaimana yang di implementasikan selama Tahun Anggaran 2021, segala aktifitas dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu:

(a) Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun

Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

(b) Kegiatan yang tidak berkesinambungan

Kegiatan yang dilaksanakan hanya dalam satu tahun anggaran, meskipun ada kemungkinan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya, namun terputus terlebih dahulu. Apabila dana mencukupi maka keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2021 merupakan kegiatan prioritas yang harus dilakukan. Hal ini mengingat tuntutan kebutuhan masyarakat Kabupaten Subang terhadap Informasi, Komunikasi dan IT sangat tinggi sebagai dampak dari adanya perubahan dan pengaruh kemajuan perkembangan wilayah Kabupaten Subang dewasa ini cukup cepat dan pesat.

Adapun hasil analisis kegiatan-kegiatan yang ditempuh selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Angka target/ standar nasional (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisa
			Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		1.95	2.4	3.2	3.3	3.01	3.01		3.3	
2	Tingkat Kematangan Smart City		INITIAL	INITIAL	SCATTERED	SCATTERED	INITIAL	INITIAL		SCATTERED	
3	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika		B (67,67)	BB (71,00)	BB (76,01)	BB (78,10)	B (67,67)	BB (71,00)		BB (78,10)	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika		B	B	B (79,25)	B (80,30)	B	B		B (80,30)	
5	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.		10%	15%	20%	30%	10%	15%		30%	
6	Indeks Keamanan Informasi		Lv I	Lv I+	Lv II	Lv II+	Lv I	Lv I+		Lv II+	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

1) Tugas dan Fungsi Diskominfo

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

2) Isu-Isu Penting Berdasarkan Tupoksi Diskominfo

Isu-isu penting yang dapat berpengaruh pada program dan kegiatan dan perlu mendapat perhatian sehingga diharapkan bisa menyelesaikan kegiatan di tahun 2021 dengan sarana dan prasarana yang lebih baik diantaranya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
2. Penyusunan konsep-konsep Regulasi bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembangunan jaringan infrastruktur TIK Kabupaten Subang yang terintegrasi;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas forum-forum komunikasi;
5. Pelayanan Keamanan Informasi;
6. Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo faktor eksternal dan internal;
8. Peningkatan Informasi secara langsung kepada masyarakat karena adanya pandemi covid-19 melalui zoom meeting, media sosial, penyiaran radio Benpas, Info realitas dan wawar keliling
9. Peningkatan pemahaman OPD dan masyarakat diluar Diskominfo terkait Komunikasi dan Informatika;



10. Peningkatan dukungan APBD dan APBN;
11. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keamanan Informasi;
12. Peningkatan penyampaian dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menghadapi beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (apabila tidak ditangani segera secara insentif) diantaranya, yaitu:

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- Dalam melayani masyarakat diperlukan Regulasi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi, seperti halnya dalam memberikan rekomendasi jaringan komunikasi serta dalam pengendalian Menara telekomunikasi;
- Kapasitas daya pancar Radio Benpas yang masih terbatas dan diperlukan peningkatan daya pancar sebagai media elektronik untuk melaksanakan desiminasi informasi pembangunan terhadap masyarakat;
- Masih minimnya anggaran untuk melaksanakan desiminasi informasi melalui media tradisional, dengan hanya dapat direalisasikan maksimal 5 kali dengan 5 desa dalam satu tahunnya, dari 253 desa yang ada di Kabupaten Subang;
- Jumlah dan detail kelengkapan teknis kendaraan roda empat “Mobil Wawar Keliling” ideal yang harus memiliki sebanyak 3 unit untuk mencakup operasional di wilayah Kabupaten Subang;
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dan tenaga ahli yang berkompeten pada bidang Informasi dan Komunikasi yang berhubungan dengan bidang jurnalistik;
- Masih belum tersedianya Studio atau tempat Pra dan Pasca Produksi peliputan media komunikasi dan informasi;
- Masih belum tersedianya media transportasi 9 mobil khusus liputan;
- Kendaraan khusus untuk pendistribusian tabloid Info Realitas ke seluruh wilayah Kabupaten Subang yang sampai dengan saat ini belum juga dapat terealisasi;
- Belum dapat dioptimalkannya PPID dalam melayani masyarakat di bidang informasi mengingat belum adanya website khusus PPID untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat;
- Fasilitas teknologi kecepatan online dalam meraih informasi sampai ke penjuru wilayah Kabupaten Subang masih minim, hal ini



dikarenakan sarana penunjang dari aspek teknologi belum terealisasi yaitu;

- *Drone* untuk mencakup wilayah Kabupaten Subang minimal berdasarkan kekuatan ukuran radius sebanyak 4 unit;
- Fasilitas *Smart Phone* untuk kemudahan online, harus segera melengkapi 6 tenaga reporter Diskominfo;
- Teknologi jaringan akses internet di 30 KIM Kabupaten Subang belum terfasilitasi;
- Ketersediaan fasilitas Radio Ling Desa, belum tersedia;
- Camera LSR tidak tersedia, memiliki 3 unit sampai saat ini belum terealisasi.

2. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi

Ketersediaan SDM tenaga ahli dalam bidangnya masih sangat terbatas, pelatihan dalam bidang pendukung teknis juga masih belum optimal dan kebutuhan anggaran yang harus dialokasikan untuk mencapai target maksimal pelayanan pada bidang ini masih terbatas, sarana dan prasarana pendukung pelayanan Teknologi Infomarsi yang tersedia saat ini masih terbatas, terdiri dari:

- Hotspot yang tersedia belum optimal;
- Kekuatan Radius *Bandwiith* belum optimal;
- Fasilitas sarana komputer penunjang Media Centre, ukuran tingkat kelayakan sebanyak 75 unit yang tersedia berjumlah 20 unit;
- Fasilitas sarana komputer operasional LPSE masih terbatas jumlah dan kualitasnya, ukuran tingkat kelayakan sebanyak 30 unit yang tersedia berjumlah 10 unit;
- Masih belum tersedianya server untuk menampung data website dan mendukung aplikasi berbagai macam elektronik dalam menunjang e-government;
- Belum tersedianya kendaraan operasional yang berfungsi sebagai media efektifitas pemantauan Menara;
- Masih belum tersedianya alat *air purifier/air humidifier* untuk penetralisir udara dalam rangka tindakan pencegahan penyebaran *corona virus disease-19*;
- *Mindset* atau paradigma aparaturnya Pemerintah Daerah terhadap persandian dan keamanan informasi perangkat daerah masih kurang serta belum dikenalnya layanan informasi oleh Perangkat Daerah;



- Belum memadainya kebijakan dan peraturan tentang persandian dan keamanan informasi perangkat daerah;
- Rendahnya minat pegawai untuk menjadi personil dalam bidang persandian dan keamanan informasi perangkat daerah;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi perangkat daerah.

3. Bidang Layanan e-Government

- Pengembangan Sistem/Aplikasi Layanan e-Government terhambat oleh sistem dan oerangkat yang kurang memadai;
- Penyelenggaraan Sistem/aplikasi Layanan e-Government terhambat oleh sistem dan perangkat yang kurang memadai;
- Penyelenggaraan Sistem/Aplikasi Layanan e-Government belum rata terimplementasikan pada Organisasi Perangkat Daerah;
- Penyelenggaraan Sistem/Aplikasi Layanan e-Government belum terintegrasi antara Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sesuai dengan Peraturan Kementrian yang baru.

2) Bidang Statistik

Kurangnya pelaksanaan Bimbingan Teknik dan Pelatihan yang terkait Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang untuk meningkatkan mutu statistik daerah.

- 3) Belum terwujudnya Pembangunan Gedung Lanjutan Kantor yang representative.

➤ Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional:

Visi dan Misi Pogram Prioritas Kepala Daerah terpilih yang dimuat dalam RPJMD 2018-2023, yaitu:

“YANG BERSIH, MAJU, SEJAHTERA DAN TERWUJUDNYA KABUPATEN SUBANG YANG BERKARAKTER”

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang masuk kedalam Misi ke, 1 yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme terbuka serta pelayanan masyarakat”**

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pencapaian Visi Kabupaten Subang 2018 ditetapkan menjadi **Panca Jimat Akur** untuk Subang Lebih Maju sebagai perwujudan capaian program pembangunan daerah Kabupaten Subang selama periode tahun 2018-2023, dengan **Program Unggulan 9 JAWARA (JAYA, ISTIMEWA dan SEJAHTERA)**, yaitu:



1) Jawara Nata

Meliputi tata ruang, perumahan, dan pemukiman, infrastruktur serta perhubungan

2) Jawara Niaga

Meliputi perindustrian, perdagangan dan KUKM

3) Jawara Wisata

Meliputi Pariwisata dan Seni serta Budaya

4) Jawara Raga

Meliputi Kependudukan, Ketenaga kerjaan, Sosial dan Kesehatan

5) Jawara Daya

Meliputi Pendidikan dan Keagamaan

6) Jawara Miara

Peternakan dan Perikanan

7) Jawara Pakaya

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

8) Jawara Riksa

Lingkungan Hidup

9) Jawara Nagara

Reformasi Birokrasi dan Hukum

Untuk mendukung pencapaian **Visi** dan **Misi** tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informatika;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mengimplementasikannya melalui program:



- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
- **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

➤ **Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah:**

Dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang terselenggara melalui system Layanan e-government dan Layanan Media Informasi Publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada dasarnya berjalan dengan baik, namun belum optimal disebabkan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas, mengakibatkan tidak optimalnya capaian keberhasilan program dan kegiatan. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian.

2. Sarana dan prasarana,

Untuk mendukung kinerja bidang Informasi dan komunikasi, Statistik dan Persandian, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Aspek sarana dan prasarana ini menjadi penentu pengelolaan data dan informasi baik pada domain konvensional maupun yang berbasis teknologi informasi.

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasarana bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kegiatan baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Terbatasnya sarana penunjang pendukung IT yang dialokasikan dari K/L Pusat dan Provinsi sebagai bantuan;
- c. Terbatasnya fasilitas media sarana informasi untuk pelayanan publik dalam pemetaan;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- e. Belum terlaksananya Pelayananusaha di bidang Informasi dan Komunikasi;
- f. Belum tersedianya perlengkapan keamanan informasi persandian;
- g. Belum tersedianya materi untuk memenuhi kegiatan statistik Sktoral;
- h. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan Statistik Sektoral;
- i. Kurangnya data potensi informasi dan komunikasi;
- j. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM);
- k. Kurang tersebarnya desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat Subang dan sekitarnya;
- l. Rendahnya pemanfaatan media Komunikasi oleh masyarakat.

3. Lemahnya Koordinasi

Peningkatan koordinasi diperlukan untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta untuk menjamin kemitraan. Akibat lemahnya koordinasi akan memunculkan:

- a. Kurang optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Kurangnya koordinasinya bantuan media IT yang dialokasikan dari K/L pusat dan provinsi.
- c. Terbatasnya intensitas dan efektifitas komunikasi dan informasi kepada masyarakat.
- d. Rendahnya koordinasi internal organisasi.
- e. Rendahnya koordinasi antara organisasi
- f. Rendahnya koordinasi antara masyarakat dan internal Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Penganggaran

Terbatasnya alokasi pagu anggaran dari APBD Kabupaten Subang untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menyebabkan belum optimalnya kinerja bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian.

➤ **Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan tantangan**

Dinas komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika tentunya tindak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan



mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi dan Informatika adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan), *Weaknes* (Kelemahan) Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. *Streanght* (Kekuatan)

- a. Tersedinya SDM di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Tersedinya Sarana dan Prasarana
- c. Tersedinya Peraturan-peraturan yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Tersedinya Anggaran.

2. *Weaknes* (Kelemahan)

- a. Belum seimbangnya Kualitas dan kuantitas SDM dengan beban Kerja yang semakin memenuhi kualitas pelayanan yang optimal terhadap masyarakat;
- b. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung pelayanan Komunikasi dan Informatika;
- c. Belum lengkapnya Regulasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Masih terbatasnya Pagu alokasi anggaran untuk SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Belum tersedianya system keamanan informasi.

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Tersedinya Lembaga Swasta Pengelolaan bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Cepatnya perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK);



- c. Adanya fasilitas berbagai bantuan dari Pusat dan Provinsi terkait bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Subang;
- e. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, murah dan mudah diakses;
- f. Memaksimalkan pelayanan informasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang (Internet, Media Center, PPID, Tabloit IR, Radio Benpas, dll);
- g. Bintek terkait penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dari Pusat dan Provinsi.

4. Threat (Ancaman)

- a. Kondisi alam, letak geografis yang mempengaruhi akses informasi;
- b. Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan pentingnya teknologi informasi;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. Cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang diterima masyarakat;
- e. Belum sinerginya antara Lembaga Pemerintah dan Non pemerintah dalam layanan informasi, termasuk standar layanan informasinya;
- f. Adanya ketidak percaya sebagai masyarakat terhadap peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Adanya ketidak pahaman masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi publik;
- h. Kondisi SDM dan Kultur Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal teknologi dan Informatika.



Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Capaian Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Capaian Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.875.668.304					13.655.155.304	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAHAN DAERAH				13,338,995,554					13.238.392.054	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				8,328,275,254			Persentase Tercapainya Program Penunjang		8.305.581.753	



	PEMERINTAHAN DAERAH							Urusan Pemerintah Daerah			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Jumlah Jenis Buku Laporan	100%	142,712,500			Jumlah Buku Laporan	100%	143.712.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Buku	4 Jenis	3,537,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOMI NFO	Jumlah Buku Perjanjian Kinerja Jumlah Buku Peta Proses Bisnis Jumlah Buku Renja	10 Buku 5 Buku 10 Buku	3.537.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKOM INFO	Jumlah Buku	25 Buku	23,700,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKOMI NFO	Jumlah Buku RKA	25 Buku	23.700,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Daerah	DISKOM INFO	Jumlah Buku	25 Buku	3,405,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISKOMI NFO	Jumlah Buku RKA Perubahan	24 Buku	3,405,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	DISKOM INFO	Jumlah Buku	15 Buku	1,925,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKOMI NFO	Jumlah Buku DPA	12 Buku	1,925,000	



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISKOM INFO	Jumlah Buku	15 Buku	1,990,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKOMI NFO	Jumlah Buku DPPA	12 Buku	2,990,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Buku	4 jenis	41,985,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKOMI NFO	Jumlah Buku IKU Jumlah Buku LKPJ Jumlah Buku LPPD	8 Buku 8 Buku 8 Buku	41,985,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Buku	2 Buku	66,170,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKOMI NFO	Jumlah Buku IKM Jumlah Buku LAKIP	46 Buku 8 Buku	66,170,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Buku Laporan	100%	6,208,646,914			Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,208,738,43	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOM INFO	Jumlah ASN	60 Orang ASN	6,198,746,914	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOMI NFO	Jumlah ASN	60 Orang ASN	6,198,838,413	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DISKOM INFO	Jumlah Buku Keuangan Akhir Tahun	20 buku laporan dan 15.000	4,950,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	DISKOMI NFO	Jumlah Buku Keuangan Akhir Tahun	12 Buku	4,950,000	



				lembar penggan daan		Tahun					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	DISKOM INFO	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran	20 Buku Laporan dan 15.000 Lembar Penggan daan	4,950,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	DISKOMI NFO	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran	12 Buku	4,950,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	27,500,000			Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	27,500,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISKOM INFO	Jumlah Pakaian Olah Raga	115 Stel	27,500,000	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISKOMI NFO	Jumlah Pakaian Olah Raga	115 Stel	27,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum PD	100%	671,413,040			Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	671,628,040	



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	11,011,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	DISKOMI NFO	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	11,011,300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	70 Jenis	160,281,240	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKOMI NFO	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	70 Jenis	160,281,240	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	28 Jenis	20,967,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISKOMI NFO	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	28 Jenis	20,957,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISKOM INFO	Jumlah Penyediaan Air Mineral Jumlah Penyediaan Aqua Galon Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	33 Dus, 24 Galon, 4034 Dus	98,800,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISKOMI NFO	Jumlah Penyediaan Air Mineral Jumlah Penyediaan Aqua Galon Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	33 Dus, 24 Galon, 4034 Dus	98,800,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKOM INFO	Jumlah Makan dan Minum Tamu	1000 Dus	23,925,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKOMI NFO	Jumlah Makan dan Minum Tamu	1000 Dus	23,925,000	



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOM INFO	Jumlah Kegiatan	335 Kali	356,438,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOM INFO	Jumlah Kegiatan	335 Kali SPPD	302,653,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	487.797.950			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	517,797,950	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Jenis	487.797.950	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	41 Jenis	517,797,950	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	561.137.850			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	561.137.850	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DISKOM INFO	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Internet	4 Rekening	361.877.850	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DISKOM INFO	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Internet	4 Rekening	361.877.850	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	DISKOM INFO	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	199.260.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	DISKOM INFO	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	199.260.000	



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	229,067,000			Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	229,067,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKOM INFO	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	23 Unit	62.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKOM INFO	Jumlah Kendaraan Roda 2 Jumlah Kendaraan Roda 4	17 Unit 6 Unit	62.420.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOM INFO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	17 Unit	35.120.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOM INFO	Jumlah Kendaraan Roda 2 Jumlah Kendaraan Roda 4	12 Unit 5 Unit	35.120.000	



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Jenis	116.530.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Jenis	116.530.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISKOM INFO	Jumlah Luas Area	5910 M ²	14.997.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISKOM INFO	Jumlah Luas Area	5910 M ²	14.997.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.150.735.550					1,150,735,550	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.150.735.550			Persentase Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,150,735,550	
	Pelayanan Informasi Publik	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik	6 Jenis	-	Pelayanan Informasi Publik	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik	6 Jenis	608,713,500	



	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	DISKOM INFO	Jumlah Peserta Sosialisasi PPID	80 Orang	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	DISKOM INFO	Jumlah Peserta Sosialisasi PPID	80 Orang	61,892,500	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Kegiatan	3 Jenis	608.713.500	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas)	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Kegiatan	3 Jenis	480,129,550	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				3.859.984.750					3.782,074,751	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.650.069.000			Persentase Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,624,619,000	



	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	DISKOM INFO	Jumlah domain dan sub domain	1 Kegiatan	25,450,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Kegiatan	0	0	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	DISKOM INFO	Jumlah layanan wifi/akses internet Broadband	90 titik	2,624,619,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	DISKOM INFO	Jumlah layanan wifi/akses internet Broadband	90 Titik	2,624,619,000	
	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,209,915,750			Persentase Jumlah Aplikasi E-Government	100%	1,157,455,751	



	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	DISKOM INFO	Jumlah aplikasi dan sistem informasi yang terintegrasi	10 aplikasi	608.390.750	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.	DISKOM INFO	Jumlah Aplikasi	10 Aplikasi	569,145,750	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	DISKOM INFO	Jumlah Kerjasama	3 Jenis	601.525.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	DISKOM INFO	Jumlah Jenis Kegiatan	3 Jenis	588,310,001	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				157,779,500					81,870,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				157,779,500					81,870,000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	157,779,500			Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,870,000	



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DISKOM INFO	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	50 orang	84,975,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DISKOMI NFO	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	50 orang	70,275,000	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	DISKOM INFO	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	50 orang	42,800,000	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.	DISKOMI NFO	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	50 Orang	7,095,000	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;	DISKOM INFO	Jumlah Buku	2 Jenis	30,004,500	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;	DISKOMI NFO	Jumlah Buku	1 Jenis	4,500,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				378,893,250					334,893,250	



	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				378,893,250					334,893,250	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	378,893,250			Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	334,893,250	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DISKOM INFO	Jumlah Kegiatan	5 Jenis	378,893,250	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DISKOMI NFO	Jumlah Kegiatan	4 Jenis	334,893,250	



2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kesinergisan pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai sasaran utama dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang akan lebih terarah apabila pertanggungjawaban dalam pembangunan daerah melalui penjabaran program dan kegiatan diolah berdasarkan hasil panduan peran serta masyarakat dengan sistem kemandirian secara *button up*, sebagai ciri kepedulian dan dukungan terhadap kebutuhan dan kemajuan dibidang informasi dewasa ini di Kabupaten Subang.

Peran serta masyarakat secara prosedur ini disampaikan melalui kegiatan Forum Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menampung aspirasi-aspirasi kebutuhan masyarakat untuk pembangunan, termasuk salah satunya adalah usulan kebutuhan pembangunan di bidang informasi. Berdasarkan hasil kajian respon dan tanggapan masyarakat Kabupaten Subang terhadap pembangunan di bidang IT dan pelayanan informasi dewasa ini cukup positif. Suasana ini ditunjang oleh berbagai faktor kebutuhan hidup dan tingginya tingkat pengetahuan masyarakat, serta pengaruh dari tingginya gaya hidup masyarakat disebabkan adanya perkembangan nilai ekonomi industri dan tata kota Subang yang semakin pesat.

- Dasar kemajuan dan perubahan IT inilah yang menjadi kriteria dalam setiap menetapkan kebijakan yang bersifat sinergis dalam tata kelola pembangunan di bidang informasi melalui program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Namun dari keterbatasan anggaran, SDM dan sarana dan prasarana serta lemahnya koordinasi baik internal maupun secara eksternal mengakibatkan masih belum optimalnya pengimplementasian program dan kegiatan untuk menciptakan kepercayaan dalam pelayanan informasi publik dewasa ini. Apalagi dengan adanya wabah penyakit Corona Virus Disease-19 membutuhkan informasi dan edukatif kepada masyarakat Kabupaten Subang secara virtual melalui Video Trone, Wawar Keliling, Media/Tabloid Info Realitas, Radio Benpas, Website Pemerintah Kabupaten Subang (subang.go.id) dan Baligho/Spanduk sehingga berita terkini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dengan minimnya anggaran hal tersebut diatas tidak dapat terealisasi. Harapan untuk ke depan Anggaran Diskominfo Tahun 2021 dilihat dari kebututuhan dan kepentingannya agar diberi dukungan anggaran dan perhatian terkait dana yang bersumber baik dari APBD maupun dari APBN.



BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, mengacu pada RPJMN 2020 - 2024, Selain Visi Indonesia 2024 dan Visi Misi Presiden Republik Indonesia, Arahan Utama Presiden Republik Indonesia untuk pemerintahan lima tahun ke depan juga menjadi pertimbangan penentuan arah kebijakan. Sesuai dengan Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024, lima Arahan Utama Presiden Republik Indonesia meliputi:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024

- 1) Fokus Pembangunan Pemerintahan Indonesia: Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi;
- 2) Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor:
 - *Broadband 4D*
Tercapainya penetrasi fixed broadband menjadi 40%-75% rumah tangga dengan kecepatan 1 Gbps dan 25% populasi, dan penetrasi internet mobile *broadband* menjadi 75% populasi sebesar 1 Mbps.
 - *Efisiensi Industri*



- Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industri telekomunikasi;
 - Membangun infrastruktur pasif bersama di 8 kota (yang di supervisi pemerintah);
 - Melakukan percepatan layanan perizinan *machine to machine*;
 - Menyusun kebijakan/regulasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang mendorong kewajiban vendor untuk mendorong kebijakan TKDN alat dan perangkat telekomunikasi 30% (SS) DAN 40% (BS) Pada tahun 2017.
- *Cyber Security & Governance*
- Menyiapkan rujukan standarisasi security untuk sektor strategis;
 - Menerapkan sertifikasi system elektronik strategis;
 - Pembentukan panel untuk penanganan situs bermuatan negatif;
 - Pemberian daftar sistem penyelenggaraan elektronik;
 - Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK).
- *E-Government*
- Menyusun masterplan dan memastikan penetapan Pepres e-government sebagai dasar penerapan layanan *e-government*;
 - Mendorong tercapainya index PeGi Nasional 3,4;
 - *Integrasi* database dan layanan *e-government* di instansi pemerintah.
- *E-Commerce*
- Merumuskan Roadmap *E-Commerce* Nasional untuk 5-10 tahun ke depan;
 - Melakukan pengumpulan data *proliferasi e-commerce*;
 - Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah *star up company*.
- *Digitalisasi*
- Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog;
 - Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal switch off (2018);
 - Mendorong percepatan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.



3) Program Legislasi Nasional: Rancangan Undang-Undang

- RUU Revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - Menyusun naskah akademik dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh *stakeholders* sebagai bahan pembahasan dengan DPR;
 - Menyusun UU pelaksanaan turunan.
- RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI)
Menyusun naskah akademik dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh *stakeholders*;
 - Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada RUU perubahan kepada DPR melalui Presiden.

4) Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental.

- *Change Management*
 - *Launching* budaya organisasi Reformasi Birokrasi dan pelayanan Kominfo;
 - Menetapkan Permen tentang Pelayan Publik di lingkungan Kominfo untuk mendorong ASN Kemenkominfo agar berorientasi pelayanan;
 - Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Kemenkominfo;
 - Menyusun system dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran;
 - Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kemenkominfo;
 - Memastikan Indeks PeGI Kemenkominfo sesuai dengan target rata-rata nasional.
- Riset Dampak Sosial dan Ekonomi Implementasi *Broadband*
 - Menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap stakeholder;
 - Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi dampak *broadband*.
- *Risk Based Internal Audit Program*
 - Pengawasan terhadap proses pengadaan;
 - Review atau evaluasi atas pengelolaan PNPB dan perizinan;
 - Audit Kinerja atas program utama Kemkominfo;



- Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah);
- Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan.

Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan;
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer
6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah
7. Meningkatkan Kualitas layanan manajemen internal

Urusan Statistik

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH.Ma'ruf Amin. Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi di tahun 2020-2024, selama 5 tahun ke depan pekerjaan kami akan dipandu oleh visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi itu ditempuh dengan Sembilan Misi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Sembilan misi merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

3.2. PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Untuk mewujudkan keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah sehingga tercapai sesuai yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan mengenai dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor pendukung sebagai kunci keberhasilan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menetapkan pencapaian keberhasilannya dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE;
3. Mewujudkan Pelayanan Data dan Informasi yang berkualitas;
4. Mewujudkan Keamanan Informasi.

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan merupakan implementasi dari tujuan dalam jangka waktu periode 1 (satu) Tahun. Maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatnya meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi;
4. Meningkatnya Pelayanan Persandian.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

VISI	“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”		
Misi I	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Membangun Jaringan Infrastruktur Layanan Publik 3. Menyediakan Aplikasi yang Berbasis Web, Mobile dan Aplikasi	Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi yang berkualitas	1. Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi Publik 2. Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Pemerintah untuk mempercepat pertukaran Data dengan mengembangkan Fasilitas Teknologi Informasi untuk mewujudkan	Membuat Sistem pengaduan masyarakat secara terbuka, mudah dan langsung ter akses kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



		<p>Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas</p> <p>3. Menyediakan dan memelihara Data Centre</p> <p>4. Membuat Aplikasi Pengelolaan Data secara Elektronik.</p> <p>5. Menyediakan Dokumen Data Potensi bidang Komunikasi dan Informatika yang Akurat.</p>	
Terwujudnya Keamanan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Persandian dan keamanan informasi	Meningkatkan Pelayanan dalam bidang Persandian	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	<p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Implementasi konsep <i>Smart City</i> (Kabupaten cerdas) dan Smart Desa</p> <p>Peningkatan Aplikasi pendukung</p>



			Validasi Data menuju terbangunnya satu Data untuk Kabupaten Subang
--	--	--	---

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Pencapaian NSPK dan SPM adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) rencananya akan disusun untuk memperjelas Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya pemberian pelayanan yang tepat kepada masyarakat. NSPK dilaksanakan agar tidak terjadi *overlap*, tarik menarik, dan kekosongan urusan pusat dan daerah. Juga dibutuhkan untuk menjamin tercapainya tujuan seperti pemerataan dan efisiensi, norma dan standar sangat penting untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan kegiatan pelayanan pemerintahan. Hal tersebut juga akan menginformasikan harapan, hak, dan kewajiban para pejabat pemerintah daerah dan masyarakat. NSPK berupa peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk program dan kegiatan mengajukan 5 Program 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan, pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.

Untuk lebih lengkapnya mengenai Rencana Kerja dan pendanaannya dapat dilihat pada Matriks Pergeseran Anggaran untuk Perubahan Anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2 Matriks Pergeseran Anggaran untuk Perubahan Anggaran Tahun 2021

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021 (tahun berjalan)											
														Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			SI SA TE ND ER (K AL AU AD A)	Sumber Dana (APBD/DAK/DID/DAU Tambahan/Banprov/Dana BOS/APBN Lainnya)	
																								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)						(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12)-(11)	(14)	(15)	(16)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										13,875,668,304	13,655,155,304	(220,513,000)							
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										13,338,995,55	13,238,392,	(100,603,500)							



																4	054				
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,328,275,254	8,305,581,753	(22,693,501)			
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										142,712,500	143,712,500	1,000,000	-		
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Buku	Jumlah Jenis Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	4 Jenis	4 Jenis	3,537,500	3,537,500	-	-	PAD	PAD	
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Buku	Jumlah Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	25 Buku	25 Buku	23,700,000	23,700,000	-	-	PAD	PAD	
2	16	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Buku	Jumlah Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	25 Buku	25 Buku	3,405,000	3,405,000	-	-	PAD	PAD	
2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Buku	Jumlah Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	15 Buku	15 Buku	1,925,000	1,925,000	-	-	PAD	PAD	



2	1 6	0 1	2	0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Buku	Jumlah Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	15 Buku	15 Buku	1,990,0 00	2,990, 000	1,000,0 00	-	PAD	PAD
2	1 6	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Buku	Jumlah Jenis Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	4 Jenis	4 Jenis	41,985, 000	41,98 5,000	-	-	PAD	PAD
2	1 6	0 1	2	0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Buku	Jumlah Jenis Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	2 Buku	2 Buku	66,170, 000	66,17 0,000	-	-	PAD	PAD
2	1 6	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,208,6 46,914	6,208, 738,4 13	91,499	-		
2	1 6	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Jumlah ASN	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	60 Orang	60 Orang	6,198,7 46,914	6,208, 738,4 13	-	-	PAD	PAD
2	1 6	0 1	2	0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku	Jumlah Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	12 Buku	12 Buku	4,950,0 00	4,950, 000	-	-	PAD	PAD



2	1 6	0 1	2	0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Buku	Jumlah Buku	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	12 Buku	12 Buku	4,950,0 00	4,950, 000	-	-	PAD	PAD	
2	1 6	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										27,500, 000	27,50 0,000	-	-		
2	1 6	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	115 Stel	115 Stel	27,500, 000	27,50 0,000	-	-	PAD	PAD	
2	1 6	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										671,41 3,040	617,6 28,04 0	(53,785 ,000)	-		
2	1 6	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,011,300	11,011,300	-	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	7 Jenis	7 Jenis	11,011, 300	11,01 1,300	-	-	PAD	PAD	
2	1 6	0 1	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160,281,240	160,281,240	-	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	70 Jenis	70 Jenis	160,28 1,240	160,2 81,24 0	-	-	PAD	PAD	



2	16	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,957,500	20,957,500	-	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	28 Jenis	28 Jenis	20,957,500	20,957,500	-	-	PAD	PAD
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,800,000	98,800,000	-	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	33 Dus, 24 Galon, 4034 Dus	33 Dus, 24 Galon, 4034 Dus	98,800,000	98,800,000	-	-	PAD	PAD
2	16	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,925,000	23,925,000	-	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	1000 Dus	1000 Dus	23,925,000	23,925,000	-	-	PAD	PAD
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356,438,000	302,694,500	(53,743,500)	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	335 Kali SPPD	335 Kali SPPD	356,438,000	302,653,000	(53,785,500)	-	PAD	PAD
2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									487,797,950	487,797,950	-			



2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	39 Jenis	39 Jenis	487,797,950	517,797,950	30,000,000-	-	PAD	PAD
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									561,137,850	561,137,850	-			
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Internet	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Internet	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	4 Rekening	4 Rekening	361,877,850	361,877,850	-	-	PAD	PAD
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	11 Orang	11 Orang	199,260,000	199,260,000	-	-	PAD	PAD
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									229,067,000	229,067,000	-	-		



2	1 6	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	23 Unit	23 Unit	62,420,000	62,420,000	-	-	PAD	PAD
2	1 6	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	17 Unit	17 Unit	35,120,000	35,120,000	-	-	PAD	PAD
2	1 6	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	12 Jenis	12 Jenis	116,530,000	116,530,000	-	-	PAD	PAD
2	1 6	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Area	Jumlah Luas Area	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	5910 M2	5910 M2	14,997,000	14,997,000	-	-	PAD	PAD
2	1	0				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											-	-		



	6	2														1,150,735,550	1,150,735,550				
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										1,150,735,550	1,150,735,550	-	-		
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik	608,713,500	-	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	6 Jenis	6 Jenis	608,713,500	608,713,500	-	-	PAD	PAD	
2	16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Sosialisasi PPID	61,892,500	-	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	80 Orang	80 Orang	61,892,500	61,892,500	-	-	PAD	PAD	
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Jenis Kegiatan	477,004,550	(3,125,000)	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	3 Jenis	3 Jenis	480,129,550	480,129,550	-	-	PAD	PAD	
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										3,859,984,750	3,783,124,750	(76,860,000)	-		



2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2,650,069,000	2,624,619,000	(25,450,000)	-			
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan	Jumlah Jenis Kegiatan	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	2 Jenis	0 Jenis	25,450,000	-	(25,450,000)	-	PAD	PAD
2	16	03	2	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah layanan wifi/akses internet Broadband	Jumlah layanan wifi/akses internet Broadband	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	90 Titik	90 Titik	2,624,619,000	2,624,619,000	-	-	PAD, DID	PAD, DID
2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,209,915,750	1,157,455,751	(52,459,999)	-			
2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	Jumlah Aplikasi	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	10 Aplikasi	10 Aplikasi	608,390,750	569,145,750	(39,170,000)	-	PAD	PAD



2	1 6	0 3	2	0 2	0 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Kegiatan	Jumlah Jenis Kegiatan	Diskom info	Diskom info	Kab. Subang	Kab. Subang	3 Jenis	3 Jenis	601,52 5,000	588,3 10,00 1	(13,214 ,999)	-	PAD, DID	PAD, DID
2	2 0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									157,77 9,500	81,87 0,000	(75,909 ,500)	-		
2	2 0	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									157,77 9,500	81,87 0,000	(75,909 ,500)	-		
2	2 0	0 2	2	0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									157,77 9,500	81,87 0,000	(75,909 ,500)	-		
2	2 0	0 2	2	0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	PD Kab. Subang	PD Kab. Subang	Disko minfo	Kab. Subang	50 Orang	50 Orang	84,975, 000	70,27 5,000	(14,700 ,000)	-	PAD	PAD



2	2 0	0 2	2	0 1	0 2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	PD Kab. Subang	PD Kab. Subang	Disko minfo	Kab. Subang	50 Orang	50 Orang	42,800, 000	7,095, 000	(35,705 ,000)	-	PAD	PAD
2	2 0	0 2	2	0 1	0 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Buku	Jumlah Jenis Buku	PD Kab. Subang	PD Kab. Subang	Disko minfo	Kab. Subang	2 Jenis	1 Jenis	30,004, 500	4,500, 000	(25,504 ,500)	-	PAD	PAD
2	2 1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									378,89 3,250	334,8 93,25 0	(44,000 ,000)			
2	2 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									378,89 3,250	334,8 93,25 0	(334,89 3,250)			
2	2 1	0 2	2	0 1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									378,89 3,250	334,8 93,25 0	(334,89 3,250)			



2	2	0	2	0	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi	OPD, Kecam atan dan Pemer intah Daerah	OPD, Kecam atan dan Pemer intah Daerah	Kab. Subang	Kab. Subang	5 Jenis	4 Jenis	378,89 3,250	334,8 93,25 0	(334,89 3,250)	-	PAD	PAD
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	----------------	----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------------------------	---	-----	-----

BAB IV PENUTUP

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang pada dasarnya berkaitan langsung dengan pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan *e-government* menuju pada *good governance*, oleh karenanya Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah melalui implementasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (*e-government*).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 ini diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pelayanan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik serta urusan persandian sebagai bentuk dukungan teknis dalam penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Subang.

Subang, Oktober 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang




Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630312 199412 1 001